

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN TERLANTAR DI KANTOR KECAMATAN CIMANGGUNG, KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh :

NAMA : DIAN AGUSTIAN TRYNANDA
NOMOR POKOK : E. 1735222977
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
PERGURUAN TINGGI SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2021

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUPATI
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM
RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN
TERLANTAR DI KANTOR KECAMATAN
CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi:

Pembimbing I

Suherman, Drs., M.Si.

NIDN.04-1603-6702

Pembimbing II

Edi Setiawan, S.Sos., M.Si.

NIDN.04-0606-7505

Mengetahui,

Ketua STIA Sebelas April Sumedang,



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si

NIDN.04-3012-7102

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : DIAN AGUSTIAN TRYNANDA
NOMOR POKOK : 1735222977
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PROGRAM RANTANG SIMPATI
BAGI LANJUT USIA MISKIN TERLANTAR
DI KANTOR KECAMATAN
CIMANGGUNG, KABUPATEN SUMEDANG

Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Hari : Sabtu
Tanggal : 14 Agustus 2021
Pukul : 08.00-selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si ()

Sekretaris : Lalas Sulastris, S.Sos., M.Si ()

Pembimbing I : Suherman, Drs., M.Si ()

Pembimbing II : Edi Setiawan, S.Sos., M.Si ()

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUPATI NOMOR 13 TAHUN
2020 TENTANG PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA
MISKIN TERLANTAR DI KANTOR KECAMATAN CIMANGGUNG
KABUPATEN SUMEDANG**

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji pada
ujian Sidang Skripsi

Tim Penguji Skripsi :

Penguji I : Deden Haria Garmana, S.IP., M.Si ()

Penguji II : Dhesty Widya N.N, S.Sos., M.Si ()

Penguji III : Fepi Febianti, S.Sos., M.I.Kom ()

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUPATI NOMOR 13 TAHUN
2020 TENTANG PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA
MISKIN TERLANTAR DI KANTOR KECAMATAN CIMANGGUNG
KABUPATEN SUMEDANG**

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji pada
ujian Sidang Skripsi

No	Dosen Penguji	Materi Perbaikan	Tanda Tangan
1	Deden Haria Garmana, S.IP., M.Si	Mengganti teknik sampling yang semula <i>Snowball Sampling</i> menjadi teknik sampling <i>Purposive Sampling</i> pada BAB III	
2	Dhesty Widya N.N, S.Sos., M.Si	Menambahkan pengertian ruang lingkup administrasi menurut LAN RI di BAB II	
3	Fepi Febianti, S.Sos., M.I.Kom	Mengubah sistematika penulisan sub-judul di setiap BAB	

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN TERLANTAR DI KANTOR KECAMATAN CIMANGGUNG, KABUPATEN SUMEDANG”** ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Maret 2021

Yang membuat pernyataan,

DIAN AGUSTIAN TRYNANDA

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN TERLANTAR DI KANTOR KECAMATAN CIMANGGUNG, KABUPATEN SUMEDANG

Disusun Oleh :

Nama : DIAN AGUSTIAN TRYNANDA
Nomor Pokok : E. 1735222977
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

191 halaman, 5 bab, 68 Tabel, 5 gambar, 8 lampiran
Daftar Pustaka: 21 buku, 5 dokumen dan 3 Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Bupati nomor 13 Tahun 2020 tentang program Rantang Simpati bagi usia miskin terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, faktor apa saja yang menjadi penghambatnya, dan bagaimana upaya mengatasi hambatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu metodologi kualitatif. Dengan informan yaitu Camat Kecamatan Cimanggung, Bendahara, Kasi sosial, Staf kasi sosial, dan Staf kasi sosial bagian monitoring. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara prosedur pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Program rantang simpati ini sebenarnya sudah berjalan cukup baik, program yang dibuat oleh Bupati Sumedang ini mengutamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lansia (lanjut usia) yang sudah sebatang kara dan tidak mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dapat dikatakan sudah baik karena dari hasil wawancara dan observasi di kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang bahwa program rantang simpati ini dari mulai dibuatkannya surat keputusan sampai tersampainya bantuan tersebut kepada sasaran sudah sesuai standar operasional prosedur, kemudian dari penyampaian informasinya meski terkendala akses jarak tempuh, namun masih bisa diupayakan melalui media online grup whatsapp dan bekerja sama dengan desa dan masyarakat sekitar, namun masih terdapat juga beberapa kendala atau permasalahan yang ditemui dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati nomor 13 tahun 2020 tentang program Rantang Simpati bagi lanjut usia miskin terlantar di kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang seperti masalah anggaran dan ketepatan waktu dalam menjalankan program ini.

faktor-faktor penghambat dalam menjalankan implementasi kebijakan peraturan Bupati nomor 13 tahun 2020 tentang program Rantang Simpati bagi lanjut usia miskin terlantar di kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang ini yaitu masih sering terjadinya keterlambatan anggaran yang turun yang diakibatkan oleh anggaran yang lebih difokuskan terlebih dahulu untuk masalah covid-19 yang menyebabkan keterlambatan waktu juga. Kemudian dari keputusan yang ditetapkan yang hanya memberikan dana sebesar Rp. 20.000 untuk satu hari makan yang dirasa masih kurang untuk bantuan makanan. Kouta penerima bantuannya pun terbatas, hanya diberi kouta 20 orang untuk satu kecamatan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Bupati



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF THE REGENT'S POLICY PROGRAM
NUMBER 13 YEAR 2020 REGARDING THE SYMPATHY RANTANG
PROGRAM FOR Abandoned POOR ELDERLY AT THE CIMANGGUNG
DISTRICT OFFICE, SUMEDANG REGENCY**

Arranged by :

Name : DIAN AGUSTIAN TRYNANDA
Main Number : E. 1735222977
Study Program : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

191 pages, 5 chapters, 68 Tables, 5 pictures, 8 appendices
Bibliography: 21 books, 5 documents and 3 Theses

This study aims to find out how the implementation of the Regent's program policy number 13 of 2020 regarding the Rantang Simpati program for the neglected poor age at the Cimanggung District Office, Sumedang Regency, what factors are the obstacles, and how to overcome the obstacles. The research method used in this research is qualitative methodology. With the informants, namely the Head of Cimanggung District, the Treasurer, the Head of Social Affairs, the staff of the social division, and the staff of the social division of the monitoring section. The data collection techniques used are library research and field studies consisting of observations, interviews, and documentation. While the data processing procedures in this study are data reduction, data presentation, data verification, and triangulation.

Based on the results of the study, it was concluded that the Rantang Sympathy Program had actually been running quite well, the program created by the Regent of Sumedang prioritized the welfare of the community, especially the elderly (elderly) who were alone and unable to work and earn income. It can be said that it is good because from the results of interviews and observations at the Cimanggung District office, Sumedang Regency that the Rantang Sympathy program from the start of making a decision letter until the aid is delivered to the target is in accordance with standard operating procedures, then from the delivery of information even though access is constrained by mileage, but it can still be pursued through online media whatsapp groups and in collaboration with villages and surrounding communities, but there are still some obstacles or problems encountered in the implementation of the Regent's regulation policy number 13 of

2020 concerning the Rantang Simpati program for the neglected poor elderly at the Cimanggung District office, Sumedang Regency has problems with budget and timeliness in carrying out this program.

Inhibiting factors in implementing the Regent's regulation policy number 13 of 2020 regarding the Rantang Simpati program for the neglected poor elderly at the Cimanggung District office, Sumedang Regency, namely that there are still frequent budget delays that fall caused by the budget being more focused on problems covid-19 which causes time delay as well. Then from the decision that was determined which only provided funds of Rp. 20,000 for one day of eating which is still not enough for food aid. The quota of beneficiaries was also limited, only 20 people were given a quota for one sub-district.

Keywords: Policy Implementation, Regent Program



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu 'alaikum, wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat berangkaitan salam penulis haturkan kepada jungjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai suri tauladan dan membawa umat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah akhirnya skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN TERLANTAR DI KANTOR KECAMATAN CIMANGGUNG, KABUPATEN SUMEDANG”** dapat terselesaikan. Skripsi ini juga merupakan syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pendidikan S-1 dan memperoleh gelar sarjana sosial pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Yth. H. Yuyun Hidayat, Drs., Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.sos., M.Si selaku Ketua STIA Sebelas April Sumedang
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha S.Sos., M.Si Selaku Pembantu Ketua I STIA Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, M.Pd., Selaku pembantu Ketua II STIA Sebelas April Sumedang.

5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.sos., M.Si selaku pembantu Ketua III STIA Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Bapak Suherman Drs., M.Si, selaku dosen Pembimbing Skripsi I.
7. Yth. Bapak Edi Setiawan, S.sos., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi II.
8. Yth. Seluruh Bapak/Ibu dosen STIA Sebelas April Sumedang.
9. Yth. Seluruh staf Tata Usaha STIA Sebelas April Sumedang.
10. Yth. Bapak Camat dan seluruh pegawai Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis.
11. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Drs. Nana Sutisna, M.Ap dan ibunda tersayang Nani Kurniasih serta Maryanti Utami Ningsih selaku Kakak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
12. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas D Angkatan 2017 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
13. Teman-teman terdekat yaitu Davi, Anggi, Apip, Rio, Ama, Usep, Ikhsan
14. Peristila Intan Gilang Sari, selaku kekasih tercinta yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

✿ Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Administrasi.

Sumedang, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....viii

DAFTAR GAMBAR.....xiii

DAFTAR LAMPIRANxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Fokus Permasalahan..... 5

C. Tujuan penelitian..... 5

D. Kegunaan penelitian..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara..... 8

2. Unsur-unsur Administrasi Negara..... 9

3. Ciri-ciri Administrasi Negara..... 10

4. Ruang Lingkup Administrasi Negara..... 11

5. Kaitan Administrasi Negara Dengan Variabel Penelitian..... 13

B. Manajemen	
1. Pengertian Manajemen.....	15
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	16
C. Organisasi	
1. Pengertian Organisasi.....	19
2. Ciri-ciri Organisasi.....	20
D. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	21
2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik.....	24
3. Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	24
E. Implementasi Kebijakan	
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	25
2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan.....	26
3. Dimensi Implementasi Kebijakan.....	27
4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	30
5. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan.....	32
6. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.....	35
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	37
G. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian	
1. Kerangka Pemikiran.....	40
2. Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian.....	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	44
B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian	
1. Penentuan Sasaran Penelitian.....	46
2. Informan Penelitian.....	46

C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Prosedur Pengolahan Data	50
E. Jadwal dan Lokasi Penelitian	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Cimanggung	53
1. Kedudukan Tugas dan Fungsi Objek Penelitian	54
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Cimanggung	55
3. Visi dan Misi Kecamatan Cimanggung	57
B. Karakteristik Sasaran Penelitian	59
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Program Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang	62
1) Dimensi Komunikasi	63
a) Kejelasan Informasi	64
b) Media	69
c) Sosialisasi	72
2) Dimensi Sumber Daya	76
a) Sumber Daya Finansial	76
b) Kualitas Pegawai	81
3) Dimensi Disposisi	85
a) Memiliki Kesamaan Komitmen	85
b) Memiliki Rasa Tanggung Jawab	90
c) Ketepatan Waktu	94
4) Dimensi Struktur Organisasi	99
a) Standar Operasional Prosedur	99
b) Pengawasan	104

D. Hasil penelitian dan pembahasan faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang..... 112

1) Dimensi Isi Kebijakan

- a) Ketidakjelasan Tujuan Kebijakan 112
- b) Masih Kurangnya Ketepatan Waktu 117
- c) Masih Kurangnya Sumber Daya Finansial 120

2) Dimensi Informasi

- a) Masih Kurang Akuratnya Penyampaian Informasi 125
- b) Masih Kurangnya Sosialisasi Terhadap Sasaran 129

3) Dimensi Dukungan

- a) Masih Kurangnya Dukungan Dari Pemerintah..... 132
- b) Masih Kurangnya Dukungan Dari Masyarakat 136

4) Dimensi Pembagian Potensi

- a) Ketidakjelasan Beban Kerja Yang Diberikan..... 140
- b) Ketidak Sesuaian Penempatan Pekerjaan 144

E. Hasil penelitian dan pembahasan Upaya-upaya Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Program Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang 151

1) Dimensi Isi Kebijakan

- a) Kejelasan Tujuan Kebijakan 152
- b) Mengefektifkan Waktu Semaksimal Mungkin 155
- c) Mengefektifkan Sumber Daya Finansial Yang Ada 159

2) Dimensi Informasi

- a) Lebih Akurat Dalam Penyampaian Informasi 163
- b) Meningkatkan Sosialisasi Terhadap Sasaran..... 167

3) Dimensi Dukungan

- a) Meningkatkan Dukungan Dari Pemerintah 171
- b) Meningkatkan Dukungan Dari Masyarakat..... 175

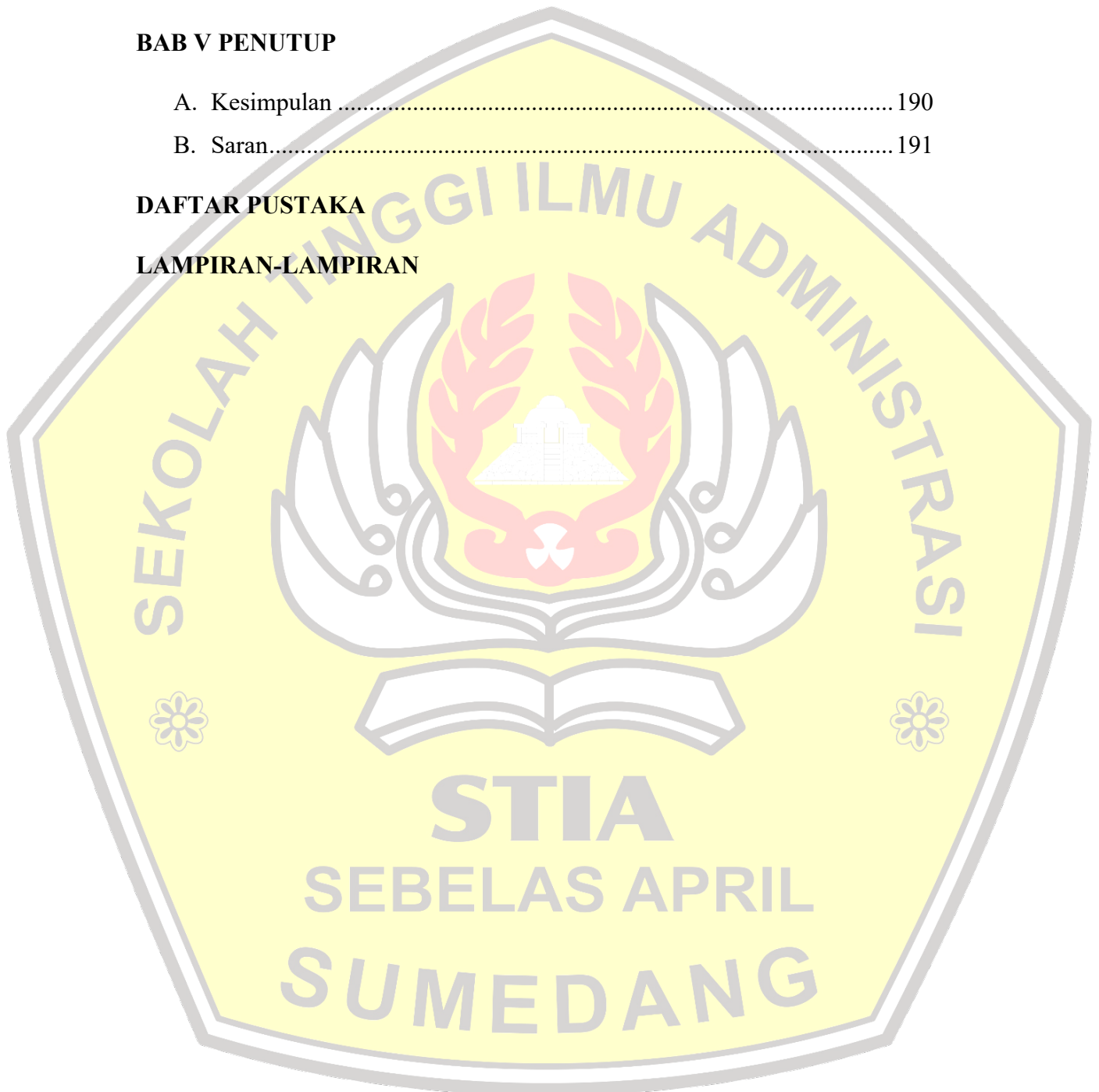
4) Dimensi Pembagian Potensi	
a) Kejelasan Dalam Pembagian Pekerjaan	179
b) Menyesuaikan Penempatan Pekerjaan.....	182

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	190
B. Saran.....	191

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian	42
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	48
Tabel 3.2	Data Informan	49
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian.....	52
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	59
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	60
Tabel 4.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	60
Tabel 4.4	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	61
Tabel 4.5	Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Cimanggung.....	62
Tabel 4.6	Reduksi Hasil Wawancara Item No 1	66
Tabel 4.7	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kejelasan Informasi.....	68
Tabel 4.8	Reduksi Hasil Wawancara Item No 2	70
Tabel 4.9	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Media	71
Tabel 4.10	Reduksi Hasil Wawancara Item No 3	74
Tabel 4.11	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Sosialisasi..	75
Tabel 4.12	Reduksi Hasil Wawancara Item No 4	78
Tabel 4.13	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Sumber Daya Finansial	80
Tabel 4.14	Reduksi Hasil Wawancara Item No 5	83

Tabel 4.15	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kualitas Pegawai	84
Tabel 4.16	Reduksi Hasil Wawancara Item No 6	87
Tabel 4.17	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kesamaan Komitmen	89
Tabel 4.18	Reduksi Hasil Wawancara Item No 7	92
Tabel 4.19	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai tanggung Jawab	93
Tabel 4.20	Reduksi Hasil Wawancara Item No 8	96
Tabel 4.21	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Ketepatan Waktu	98
Tabel 4.22	Reduksi Hasil Wawancara Item No 9	101
Tabel 4.23	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Standar Operasional Prosedur.....	103
Tabel 4.24	Reduksi Hasil Wawancara Item No 10	105
Tabel 4.25	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Pengawasan	107
Tabel 4.26	Rekapitulasi Implementasi Kebijakan Program Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang	109
Tabel 4.27	Reduksi Hasil Wawancara Item No 11	114
Tabel 4.28	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Ketidakjelasan Tujuan Kebijakan	115
Tabel 4.29	Reduksi Hasil Wawancara Item No 12	118

Tabel 4.30	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kurangnya Ketepatan Waktu	119
Tabel 4.31	Reduksi Hasil Wawancara Item No 13	122
Tabel 4.32	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kurangnya Sumber Daya Finansial.....	123
Tabel 4.33	Reduksi Hasil Wawancara Item No 14	126
Tabel 4.34	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kurang Akuratnya Penyampaian Informasi	127
Tabel 4.35	Reduksi Hasil Wawancara Item No 15	130
Tabel 4.36	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kurangnya Sosialisasi Terhadap Sasaran.....	131
Tabel 4.37	Reduksi Hasil Wawancara Item No 16	134
Tabel 4.38	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kurangnya Dukungan Dari Pemerintah	135
Tabel 4.39	Reduksi Hasil Wawancara Item No 17	137
Tabel 4.40	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kurangnya Dukungan Dari Masyarakat.....	139
Tabel 4.41	Reduksi Hasil Wawancara Item No 18	141
Tabel 4.42	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Ketidakjelasan Beban Kerja Yang Diberikan	143
Tabel 4.43	Reduksi Hasil Wawancara Item No 19	145
Tabel 4.44	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Ketidak Sesuaian Penempatan Pekerjaan.....	147
Tabel 4.45	Rekapitulasi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang	

	Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang	149
Tabel 4.46	Reduksi Hasil Wawancara Item No 20	153
Tabel 4.47	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kejelasan Tujuan Kebijakan	154
Tabel 4.48	Reduksi Hasil Wawancara Item No 21	157
Tabel 4.49	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Mengefektifkan Waktu Semaksimal Mungkin	158
Tabel 4.50	Reduksi Hasil Wawancara Item No 22	161
Tabel 4.51	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Mengefektifkan Sumber Daya Finansial Yang Ada	162
Tabel 4.52	Reduksi Hasil Wawancara Item No 23	164
Tabel 4.53	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Lebih Akurat Dalam Penyampaian Informasi	166
Tabel 4.54	Reduksi Hasil Wawancara Item No 24	169
Tabel 4.55	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Meningkatkan Sosialisasi Kepada Sasaran.....	170
Tabel 4.56	Reduksi Hasil Wawancara Item No 25	173
Tabel 4.57	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Meningkatkan Dukungan Dari Pemerintah	174
Tabel 4.58	Reduksi Hasil Wawancara Item No 26	177
Tabel 4.59	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Meningkatkan Dukungan Dari Masyarakat.....	178
Tabel 4.60	Reduksi Hasil Wawancara Item No 27	180

Tabel 4.61	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Kejelasan Dalam Pembagian Kerja	181
Tabel 4.62	Reduksi Hasil Wawancara Item No 28	184
Tabel 4.63	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Mengenai Menyesuaikan Penempatan Pekerjaan.....	185
Tabel 4.64	Rekapitulasi Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Program Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang	188



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 3.1	Desain Penelitian.....	45
Gambar 3.2	Komponen Dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>).....	51
Gambar 4.1	Peta Lokasi Kecamatan Cimanggung	53
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung	56



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor: 0032/SK/D-STIA/UN/K/I/2021 tentang penetapan Mahasiswa Penyusun Skripsi Tahun Akademik 2017/2018
- Lampiran 2 Surat Keputusan Camat Cimanggung Nomor: 141.1/SK. 05/KEC./2020 tentang penerimaan program bantuan rantang simpati tingkat kecamatan cimanggung tahun 2020
- Lampiran 3 Surat Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 6 Pedoman Observasi
- Lampiran 7 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Sumedang yang sejahtera, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia miskin telantar berupa pangan yang diselenggarakan melalui program Rantang Simpati yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lansia Miskin. Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan Undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparatur pemerintah maupun masyarakat.

Program Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati ini berfokus pada masyarakat lanjut usia yang hidup sendiri dan tidak memiliki penghasilan atau tidak memiliki mata pencaharian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rantang simpati merupakan pemberian bantuan berupa pangan yang bagikan melalui rantang kepada masyarakat lansia berumur 60 tahun keatas.

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan program Rantang Simpati ini berlandaskan kepada peraturan-peraturan di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77

Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, pemenuhan hak-hak sosial dapat terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, dan kelompok rentan lainnya.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia diperlukan sebagai landasan hukum untuk aparat, pemerintah dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upayanya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia, secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh.

Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan masyarakat khususnya bagi kaum lansia dalam mensejahterakan dan memberdayakan kehidupannya. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 yaitu upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat lanjut usia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan bertambahnya usia, kondisi fisik manusia akan menurun. Oleh karena itu, penduduk lanjut usia memiliki kerentanan sosial maupun ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda

sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan terciptanya kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, termasuk di dalamnya lansia. Selain itu, lansia juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu diperhatikan khususnya dengan program-program perlindungan sosial.

Dalam penyelenggaraan Program Bupati Kabupaten Sumedang, perlu diperhatikan dari segi perencanaan yang baik sehingga pencapaiannya sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati. Pada dasarnya program ini merupakan program yang bertujuan memberi kesejahteraan masyarakat bagi kaum lansia di Kabupaten Sumedang. Melalui program ini setiap masyarakat lansia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dengan cara memberikan kebutuhan dasar pangan.

Hasil wawancara peneliti kepada pegawai kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten sumedang yang menjelaskan bahwa Program Rantang Simpati ini masih terjadi beberapa kendala dalam implementasinya. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada belum optimalnya pengimplementasian peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lansia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Adapun indikasi-indikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Selalu ada saja di tiap desa yang mengalami keterlambatan penyampaian rantang simpati, karena proses pemberian bantuan yang diberi dari Kecamatan melalui desa-desa terlebih dahulu dan dari desa selalu menitipkan dengan warung makan terdekat dengan penerima bantuan program rantang simpati. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan staf kasi sosial di kantor kecamatan Cimanggung.
2. Tidak meratanya penerima bantuan program. Hal ini dapat dibuktikan dengan diberikannya bantuan program bagi lansia di satu desa hanya memperoleh satu sampai dua lansia dikarenakan hanya diberi 20 kouta untuk satu kecamatan.
3. Masih sering terjadi keterlambatan anggaran yang masuk ke Kecamatan. Hal ini dibuktikan pada hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan Cimanggung bagian monitoring program Rantang Simpati.

Berdasarkan pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN TERLANTAR DI KANTOR KECAMATAN CIMANGGUNG, KABUPATEN SUMEDANG**”

B. Fokus Permasalahan

Dari fokus permasalahan diatas, maka rumusan permasalahanya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan peneliti dalam menghadapi masalah yang ada. Serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial.

2. Secara praktis

Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna diantaranya:

- a. Bagi penulis

Sebagai wahana dalam mengembangkan pengetahuan mengenai Program Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar.

- b. Bagi pihak kampus

Sebagai bahan refrensi tambahan tambahan di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.

c. Bagi Kecamatan Cimanggung

Sebagai bahan masukan mengenai seberapa jauh implementasi kebijakan Program Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi Negara adalah kegiatan-kegiatan atau proses/usaha dibidang pemerintahan atau kenegaraan. Menurut Presthus (Handyaningrat, 1980: 3) mengatakan : *“Public Administrasi is a process concerned with carrying out public policies”* (Administrasi Negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara).

Menurut Litchfield (1956:1) mengatakan “Administrasi Publik adalah suatu sandi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin”.

Menurut Kahyo (1996:4) “Administrasi Negara ialah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alat-alat negara untuk melaksanakan atau mewujudkan politik negara atau politik pemerintahan”.

Dari definisi para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Administrasi Negara adalah suatu kegiatan/proses-proses yang dilakukan oleh negara/badan pemerintahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.

2. Unsur-Unsur Administrasi Negara

Untuk memahami Administrasi secara luas, penulis mengemukakan beberapa teori yang disampaikan oleh Handyaningrat (1980: 7) mengenai pengelompokan bidang administrasi diantaranya:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Kepemimpinan
4. Pengambilan keputusan
5. Hubungan antar manusia

Menurut Anggara (2012: 18) berpendapat bahwa dalam proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lain, yang apabila salah satunya tidak ada, proses operasi administrasi akan pincang.

Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata Usaha
8. Hubungan Masyarakat

Menurut Muhamad (2019: 6) Dalam proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lain, yang apabila salah satunya tidak ada, proses administrasi akan pincang. Unsur –unsur tersebut meliputi sebagai berikut :

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian

5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata Usaha
8. Hubungan Masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur administrasi negara merupakan hubungan dari unsur satu dengan unsur yang lainnya dan saling berkaitan untuk menjalankan sebuah kegiatan/proses yang sudah ditetapkan sebelumnya. Melihat beberapa pendapat ahli diatas mengenai unsur-unsur administrasi dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang saling terkait. Dimana administrasi merupakan proses pengaturan atau upaya yang dilakukan didalam organisasi yang didalamnya terdiri dari beberapa orang yang melakukan kerja sama guna mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama.

3. Ciri-Ciri Administrasi Negara

Menurut Thoha (2008: 4) mengemukakan ciri-ciri administrasi antara lain:

1. Pelayanan yang diberikan bersifat *urgent* (penting) jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi swasta.
2. Pelayanan yang diberikan pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
3. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berarti mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan yang diberikan tidak dikendalikan oleh pasar.
5. Usaha-usaha yang dilakukan sangat tergantung pada penilaian masyarakat.

Menurut Nigro (Pasalong, 2014: 21) sebagai berikut:

1. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah.
2. Meliputi tiga cabang pemerintah: eksekutif, legislatif, dan serta hubungan diantara mereka.
3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakanpemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

4. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Berdasarkan ciri-ciri administrasi negara diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi negara berorientasi pada pemberian pelayanan pemerintah atau organisasi privat yang dianggap penting dan berbeda dari pelayanan yang diberikan organisasi swasta, serta pelayanan yang diberikan bersifat monopoli dan semi monopoli. Selain dari pada itu pelayanan yang diberikan oleh administrator pun harus memiliki landasan hukum berupa undang-undang ataupun peraturan serta pelayanan-pelayanan yang diberikan berorientasi pada kepentingan umum atau rakyat.

4. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Salah satu persoalan dalam beberapa paradigma administrasi negara seperti yang telah diuraikan dimuka ialah adanya usaha untuk membedakan antara negara (*public*) dalam istilah administrasi negara dengan swasta atau perusahaan (*private organization*). Ada sementara pihak yang menyatakan bahwa keduanya sulit dibedakan, dan ada pula yang menyatakan bahwa keduanya bisa dibedakan. Penggunaan istilah negara dalam administrasi negara memberikan kesan seakan-akan administrasi negara tersebut tidak mencampuri urusan-urusan swasta.

Menurut Henry (Anggara, 2018: 74) ciri-ciri tersebut adalah:

1. Kegiatan yang tidak bisa dihindari (*Unavoidable*), titik tekanannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara Negara dan Masyarakat bersifat pasti.
2. Monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Negara memiliki kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum, kekuasaan untuk melaksanakan paksaan dipahami sebagai *coercive*

power, administrasi negara merupakan penjelmaan dari hal tersebut dapat diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian, kehakiman dan lainnya.

3. Prioritas, administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat sehingga memiliki prioritas dalam memberikan arahan ataupun layanan.
4. Ukuran yang tidak terbatas, lingkup masyarakat dinegara meliputi batasan teritorial suatu negara, yang didalamnya terdapat administrasi negara.

Dari rumusan administrasi negara di atas, dapat dikenali dan dirumuskan ruang lingkup yang merupakan bidang perhatian administrasi negara, LAN RI (2003: 10) mengemukakan bahwa ditinjau dari segi unsurnya yang pokok dalam kehadirannya sebagai disiplin dan sebagai sistem lingkup perhatian administrasi tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Tata nilai, yang meliputi dasar tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai kultural, dan institusional yang berkembang dalam kehidupan negara bangsa, termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghimatinnya.
- b. Organisasi pemerintah negara, yang meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintah negara yang berbeda di wilayah pemerintahan negara dan sering disebut birokrasi pemerintah, terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan) dan lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling hubungannya dalam rangka penyelenggaraan negara, termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut.
- c. Manajemen pemerintah negara, meliputi kegiatan penegelolaan pelaksanaan tugas pemerintah umum dan membangun dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintah.
- d. Sumber daya aparatu negara, sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara: pengelolaan dan pembinaannya merupakan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya.
- e. Sistem proses kebijakan negara, sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara peran administrasi negara dalam pengelolaan kebijakan pemerintah negara.
- f. Posisi, kondisi dan peran masyarakat bangsa dan negara, negara eksis dalam suatu wilayah karena adanya kesepakatan masyarakat bangsa yang hidup pada wilayah tersebut.

- g. Hukum administrasi negara, hal ini meliputi dimensi hukum bertalian dengan peraturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara, saling hubungannya satu sama lain, dan karya masing-masing lembaga negara tersusun dan terselenggara secara efisien, profesional, efektif dan *legitimate*

5. Kaitan Administrasi Negara Dengan Variabel Penelitian

Administrasi Negara adalah suatu ilmu yang luas, dalam kajian ilmu administrasi negara banyak menyangkut dan mempelajari kebijakan publik baik itu pelaksanaannya maupun perumusannya yang dilakukan oleh para administrator negara. Pelaksanaan kebijakan dijalankan oleh para pelaku administrasi negara untuk mengatasi ataupun mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah dengan memberlakukan kebijakan politik untuk dirumuskan sekaligus dilaksanakan.

Studi tentang pelaksanaan kebijakan publik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau mempunyai keterkaitan dengan Administrasi Negara. Adanya definisi Administrasi Negara mengalami revisi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik menurut para ahli, sebagian diantaranya akan dituangkan oleh peneliti.

Definisi Administrasi Negara yang mengalami revisi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik seperti yang dikemukakan oleh Gordon (Indradi, 2016: 108) mengemukakan bahwa “Administrasi Negara merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan”.

Menurut Starling (Indradi, 2016:107) mengemukakan bahwa “Administrasi Negara adalah semua yang dicapai pemerintah, yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan”. Sedangkan menurut Abdurrachman (Indradi, 2016: 108) menyebutkan Administrasi Negara yaitu ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Berdasarkan pendapat ahli diatas bahwa birokrasi lembaga legislatif, lembaga peradilan merupakan badan atau lembaga Administrasi Negara dan merupakan aktor yang terlibat sebagai badan atau lembaga yang merumuskan kebijakan maupun sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah dirumuskan tersebut.

Adapun menurut Winarno (2012: 36) Tahapan kebijakan publik yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Penyusunan Agenda
Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain di tetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang sama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk kepada agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy options*) yang ada. Sama hal nya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk merain dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, di tentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Pendapat diatas semakin memperjelas pemahaman peneliti bahwa pelaksana kebijakan memiliki keterkaitan atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan administrasi negara, karena orang-orang yang berada didalam suatu organisasi pemerintah atau para administrator negara merupakan orang-orang yang harus merumuskan dan mengimplementasikan serta melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh para administrator tersebut.

B. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses mengarahkan dan menggerakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Soehardjono (2000: 103) mengemukakan bahwa “ Manajemen terkait erat dengan kemampuan, kecakapan dan penguasaan ilmu, wawasan dan kepribadian pemimpin dalam melaksanakan pekerjaanya, maupun kegiatan dalam berbagai aspek serta lini kehidupan”.

Menurut Thoha (dalam Silalahi 1989: 136) mengatakan “ Manajemen sebagai aktivitas menggerakkan segenap orang dan mengarahkan semua fasilitas yang dipunyai oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Terry (Handyaningrat, 1980: 20) mengemukakan

“Management is a distinc process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utiliting in each both science an art, and followeed in order to accomplish predetermined objective” (Manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas: Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Hasibuan (2001: 2) mengatakan “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan”.

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni dalam melaksanakan maupun kegiatan dalam berbagai aspek serta lini kehidupan dengan metode Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, Pelaksanaan, dan Pengawasan agar dapat menyelesaikan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Manajemen memiliki fungsi-fungsi dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut Terry (Handyaningrat, 1980: 25) mengemukakan fungsi-fungsi dari manajemen diantaranya:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat, dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang (*future*) dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaknya

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah menentukan, pengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan.

c. Penggerakan Pelaksanaan (*Actuating*)

Penggerakan pelaksanaan adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan agar upaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar.

Menurut Namara (Hasibuan, 2001: 38) fungsi manajemen terdiri dari:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Pengaturan (*Programming*)

Fungsi *Progamming* yaitu proses atau cara pembuatan dan program, dengan kata lain berfungsi sebagai rancangan mengenai asas-asas atau usaha-usaha yang dijalankan. Fungsi ini hampir hampir sama dengan *Planning* namun fuungsi ini lebih terprogram atau kata lainnya terstruktur.

c. Penganggaran (*Budgeting*)

Penganggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter, serta berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

d. Sistem (*System*)

Sistem merupakan salah satu fungsi manajemen berupa sistem informasi yang mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen.

Menurut Newman (Handayani, 1980: 20) pekerjaan seorang manajer yang dapat dibagi menjadi 5 proses, antara lain:

1. Perencanaan (*Planning*)
Perencanaan ini meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan metode dan prosedur serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
Pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit untuk melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya di dalam setiap unit.
3. Pengumpulan Sumber (*Assembling resources*)
Pengumpulan sumber berarti pengumpulan sumber-sumber yang dipergunakan untuk mengatur penggunaan daripada usaha-usaha tersebut yang meliputi personal, uang/kapital, alat-alat/fasilitas dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
4. Pengendalian Kerja (*Supervising*)
Pengendalian kerja ialah bimbingan daripada pelaksanaan pekerjaan setiap hari termasuk memberikan intruksi, motivasi (dorongan) agar mereka secara sadar menuruti segala intruksinya. Mengadakan koordinasi daripada bergabai kegiatan pekerjaan dan memelihara hubungan kerja baik antara atasan dan bawahan.
5. Pengawasan (*Controlling*)
Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana. Hal ini menyangkut penentuan standar. Artinya memperbandingkan antara kenyataan dengan standar dan bila perlu mengadakan koreksi/pembetulan apabila pelaksanaanya menyimpang dari rencana.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah adanya perencanaan yang dibuat dengan sebaik-baiknya dan adanya pengelompokan beberapa orang untuk melaksanakan rencana yang sudah dirancang serta adanya pengawasan dari pimpinan agar pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan adanya penganggaran dalam melaksanakan rencana yang dijalankan.

C. Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Organisasi berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya.

Menurut Hasibuan (2001: 120) mengatakan “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja”.

Menurut Atmosudiro (Hasibuan, 2001: 121) mengatakan “Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu”.

Menurut Handyaningrat (1980: 42) mengatakan “Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan daripada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya mencapai tujuan”.

Dari pendapat para ahli diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dengan sistem yang terkoordinasi dan berstruktur dalam menjalankan suatu rencana yang sudah ditetapkan agar tercapainya keinginan yang sebelumnya sudah ditetapkan.

2. Ciri-Ciri Organisasi

Dalam organisasi, terdapat ciri-ciri yang didefinisikan oleh beberapa ahli, menurut Handyaningrat (1980: 43) ciri-ciri organisasi antara lain:

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (*interdependent part*) yang merupakan kesatuan usaha/kegiatan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya/kegiatannya.
4. Adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan (*the idea of goals*).

Adapun penjelasan ciri-ciri organisasi menurut Hasibuan (2001: 126) ciri-ciri organisasi yang baik dan efektif yaitu:

1. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis.
2. Pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antar unit-unit, sub-subsistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas.
3. Organisasi itu harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan.
4. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan perusahaannya.
5. Unit-unit kerja (departemen-bagiannya) ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan.
6. *Job description* setiap jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan.
7. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak.
8. Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas melalui jarak yang terpendek.
9. Jenis wewenang (*authority*) yang dimiliki setiap pejabat harus jelas.
10. Mismanajemen penempatan karyawan tidak ada.
11. Hubungan antara bagian dengan bagian lainnya jelas dan serasi.
12. Pendelegasian wewenang harus berdasarkan *job description* karyawan.

13. Diferensiasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus baik.
14. Organisasi harus luwes dan fleksibel.
15. Organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri organisasi yaitu adanya beberapa orang yang bekerjasama dengan satu tujuan yang sudah ditetapkan, dan adanya pembagian kerja dan wewenang, serta terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

D. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum penulis lebih jauh memaparkan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, terlebih dahulu penulis kemukakan definisi kebijakan publik menurut para ahli.

Menurut Anderson (Winarno, 2012: 21) menyatakan bahwa “Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Sedangkan menurut Friedrich (Winarno, 2012: 20) menyatakan bahwa:

kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan- hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Rose (Winarno, 2012: 20) menyatakan bahwa “Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak

berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri”.

Dari definisi ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu proses yang mencakup tahap implementasi atau pelaksanaan yang mempunyai arah dan tujuan. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada didalam masyarakat. Apabila kebijakan tersebut berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Secara termologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup baerbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Selain itu jika dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, persturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Menteri, peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, keputusan Gubernur, peraturan Daerah Kabupaten/ Kota,dan keputusan Bupati/Walikota.

Menurut Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2011: 93) mendefinisikan bahwa "Kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu" (*a projected program of goals, values, and practices*)".

Sedangkan, menurut Friedrick (Nugroho, 2011: 93) menyatakan bahwa:

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan.

Selanjutnya, Dye (Nugroho, 2011: 94) mengemukakan bahwa "kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan berasa tampil berbeda (*what goverment do, why they do it, and what difference it makes*)". Sedangkan menurut Eyestone (Winarno, 2012: 20) ,menyatakan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu lingkup kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau publik dan juga aktor pejabat pemerintah yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah ataupun kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat pelaksanaan dari adanya peraturan Bupati Kabupaten Sumedang dalam UU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar.

2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat rasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Adapun ruang lingkup kebijakan publik secara khusus adalah :

- 1) Studi tentang perilaku elite politik dan birokrasi.
- 2) Peran kelompok kepentingan dalam proses kebijakan.
- 3) *Shared cocren problems* antar *actor* politik yang terlibat dalam proses pembuatan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan.

3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu di rumuskan.

Ciri ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan publik lebih mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik moderen merupakan suatu tindakan yang di rencanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

- 3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula Negatif kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat kebijakan harus dibedakan dari keputusan dan administrasi ,tetapi tetap tujuan yang akan di capai yaitu harus tetap yang menjadi sasaran yang sudah di definisikan secara subyektif.

E. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakkan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakkan dapat mencapai tujuannya. Dalam implementasi kebijakan tersebut, adapun pengertian-pengertian yang dikutip oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

Winarno (2005:101) “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atas tujuan yang diinginkan”.

Sedangkan Wahab (1990:123) Mengatakan bahwa

Implementasi itu adalah untuk membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir (*outcome*) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara (*policy Science*) disebut sistem penyampaian/ penerus kebijakan negara (*policy delivery system*) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/di desain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Mulyadi (2015:26) “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Islamy (2013: 102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat *non- self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gun (Nughroho, 2014: 243) mengemukakan sejumlah implementasi sebagai berikut :

- ✿ Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
 - b. Menentukan standar pelaksanaan.
 - c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
- Tahap II Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
- Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan:
 - a. Menentukan jadwal.
 - b. Melakukan pemantauan.
 - c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat di ambil tindakan yang sesuai dan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang terjadi sesudah suatu program diperlakukan atau dirumuskan yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha administratif maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran, tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial, yang berpengaruh kepada implementasi kebijakan negara.

3. Dimensi Implementasi Kebijakan

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% adalah bagaimana kita bisa mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman adalah konsistensi implementasi. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dilihat dari model implementasi kebijakan tersebut, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Model yang dikembangkan oleh Edward III (Winarno, 2012: 177) mengatakan bahwa masalah utama Administrasi Publik adalah *lack of attention to implementation*. dikatakan nya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Resource*)
3. Disposisi (*Disposition or attitude*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic stucturees*)

Untuk lebih jelasnya mengenai dimensi implementasi kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Komunikasi (*Comunication*)

Komunikasi berkenaan dengan keinginan kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi Komunikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Kejelasan Informasi yaitu informasi yang akan disampaikan harus jelas.
- b. Media, yaitu alat untuk menyampaikan sebuah informasi.
- c. Sosialisasi yaitu untuk memasukan nilai-nilai informasi agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota.

b) Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan Sumberdaya pendukung khususnya Sumber Daya Manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan Kebijakan Publik untuk *Carry Out* kebijakan secara efektif. Meskipun isi

Kebijakan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan Sumber Daya untuk melaksanakan, maka Implementasi tidak akan berjalan efektif.

Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi Sumber Daya yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Financial, yaitu saham atau obligasi yang dimiliki sebuah perusahaan.
- b. Kualitas Pegawai, yaitu jumlah pegawai atau seberapa banyak pegawai di perusahaan atau instansi tersebut.
- c) Disposisi (*Disposition or Attitude*)

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* Kebijakan Publik tersebut kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi sering di artikan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh Implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila Implementor memiliki Disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi Disposisi yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki kesamaan komitmen, yaitu suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian atau keterkaitan baik diri sendiri dan orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela ataupun terpaksa.

- b. Bertanggung Jawab, yaitu kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja
- c. Ketepatan waktu dalam menjalankan tugas, yaitu suatu informasi yang harus digunakan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keputusan.
- d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Stucrutees*)

Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi Birokrasi yang menjadi penyelenggara Implementasi Kebijakan Publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses Implementasi menjadi jauh dari efektif. struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi Struktur Birokrasi yaitu sebagai berikut :

- a. Standar Operasional Prosedur adalah suatu set intruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif.
- b. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah diterapkan tersebut.

4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan

kebijakkan, kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Menurut Sunggono (Andita, 2016: 41) implementasi kebijakan mempunyai faktor penghambat, yaitu:

- 1) Isi Kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya- sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu biaya atau adana dan tenaga manusia.
- 2) Informasi
Implentasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berakitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- 3) Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Pembagian Potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implentasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implentasi. dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatsan-pembatsan yang kurang jelas.

5. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan atau implementasinya di dukung oleh sarana-sarana yang memadai. Berkaitan dengan permasalahan atau hambatan dalam implementasi suatu kebijakan, dalam upaya mengatasi penulis menggunakan variabel yang sama seperti halnya variabel yang digunakan dalam faktor pengambat implementasi kebijakan, diantaranya menurut Sunggono (Andita, 2016: 41) dalam buku hukum dan kebijakan publik mengemukakan bahwa:

1. Isi Kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian Potensi

Berdasarkan point-point implementasi diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Isi Kebijakan

1. Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
2. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

4. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu biaya atau dana dan tenaga manusia.

Dilihat dari uraian diatas maka indikator-indikator dari dimensi kualitas kebijakan ini adalah:

1. Kejelasan tujuan kebijakan yaitu tujuan kebijakan jelas dan pelaksanaan optimal tanpa ada hambatan atau masalah.
2. Mengefektifkan sumber daya financial yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan.
3. Mengefektifkan waktu semaksimal mungkin.

b) Informasi

Dalam mengatasi hambatan informasi cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan tindakan dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan menghilangkan pilihan dari multi interpretasi atau penafsiran informasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Dilihat dari uraian diatas maka indikator-indikator dari dimensi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Mengefektifkan waktu sebaik mungkin.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada kelompok sasaran.

c) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan tersebut baik itu dukungan dari sasaran kebijakan ataupun dari pemerintah.

Dilihat dari uraian diatas maka indikator-indikator dari dimensi dukungan kebijakan ini adalah:

1. Meningkatkan dukungan dari masyarakat.
2. Meningkatkan dukungan dari pemerintah.

d) Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Dilihat dari uraian diatas maka indikator-indikator dari dimensi kualitas kebijakan ini adalah:

1. Menyesuaikan penempatan pekerjaan.
2. Mengoptimalkan pembagian tugas.
3. Menyesuaikan beban kerja sesuai kemampuan

6. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar

a) Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, dalam hal tersebut, pemerintah selalu membuat program yang mengutamakan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya masyarakat yang sudah lanjut usia. Sudah seharusnya sebagai Aparatur Negara yang berbudi luhur selalu menghormati orangtua yang sudah lanjut usia dalam memberikan pelayanan terbaik.

Program Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar merupakan program Bupati Sumedang yang di khususkan bagi lanjut usia miskin terlantar di Kabupaten Sumedang. Adapun syarat-syarat bagi penerima bantuan adalah:

- a. Fakir Miskin dengan usia 60 tahun ke atas,
- b. Hidup sendiri di rumah tanpa keluarga,
- c. Tidak memiliki mata pencaharian dan penghasilan, dan
- d. Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan

Adapun mekanisme penyampaiannya kepada lansia adalah:

1. Camat menetapkan jumlah dan rincian data Lanjut Usia miskin Terlantar penerima Program Rantang Simpati melalui Keputusan Camat.

2. Camat membuat daftar penerimaan makanan yang ditandatangani atau cap jari oleh lanjut usia miskin terlantar penerima Program Rantang Simpati sebagai bukti penerimaan makanan setiap hari yang diantarkan oleh warung nasi atau badan usaha milik desa.
3. Dalam hal penyediaan makanan untuk Lanjut Usia miskin Telantar, Camat dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha milik desa atau warung nasi.
4. Warung nasi yang jaraknya paling dekat dengan lokasi Lanjut Usia miskin Telantar penerima Program Rantang Simpati dengan omset per bulannya tidak melebihi Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Makanan untuk Lanjut Usia miskin Telantar penerima Program Rantang Simpati harus memenuhi asupan gizi sesuai standar menu gizi Lanjut Usia.
6. Puskesmas setempat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa makanan Lanjut Usia miskin Telantar memenuhi asupan gizi sesuai standar menu gizi Lanjut Usia.
7. Badan usaha milik desa atau warung nasi mengantarkan makanan setiap hari kepada Lanjut Usia miskin Telantar Penerima Program Rantang Simpati.

b) Manfaat Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar

Dengan adanya program tersebut, pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat lansia yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam hal ini, pemerintah

Kabupaten Sumedang sudah menjalankan sila ke-5 dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tidak membedakan dalam pemberian bantuan program. Dengan bantuan Rantang Simpati juga, pemerintah dapat menjunjung tinggi nilai budi luhur dalam melayani masyarakat yang sudah lanjut usia, karena yang dinamakan Aparatur Negara adalah Aparatur yang dapat melayani masyarakat serta menghormati masyarakat yang sudah lanjut usia.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU Mona Silviany (2015)	1. Variabel penelitian yakni implementasi program kesejahteraan lansia 2. Metode Penelitian Kualitatif	1. Lokus penelitian Kecamatan Palu Barat Kota Palu 2. pemberian bantuan tidak hanya berupa pangan.	Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut/ usia Di Kecamatan Palu Barat Kota Palu adalah sudah terlaksana dengan baik, sesuai analisis teori implementasi kebijakan Rippley dan Franklin, dimana ke-tiga faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan program UEP bagi lansia telah terpenuhi, 3 (tiga) factor tersebut adalah: 1) Faktor Kepatuhan atau ketaatan aparatur (aparatur sebagai implementor), 2) Aspek Kelancaran dan tidak adanya persoalan/masalah yang berarti, dan, 3)

				Faktor Kinerja.
2.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN LANSIA TERLANTAR (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu) Mariama, Qamariah, Afifuddin, Suyeno (2020)	1. Variabel penelitian yakni implementasi program kesejahteraan lansia 2. Metode Penelitian Kualitatif	1. Lokus penelitian Kota Batu 2. Pemberian bantuan tidak hanya berupa pangan.	Proses dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlanter pada dinas sosial Kota Batu sendiri senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Yang dimana faktor pendukung dalam pelaksanaannya program bantuan sosial ini meliputi intregasi antar pelaksana, banyaknya dukungan publik, sikap/komitmen dari aparat pelaksana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat proses dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlanter pada dinas sosial Kota Batu adalah keterbatasannya sumber daya manusia sebagai pelaksana, keterbatasan alokasi anggaran yang menyebabkan tidak dapat mengcover seluruh lansia terlanter yang berada di kota Batu, juga keterbatasan fasilitas seperti rumah singgah sementara.
3.	IMPLEMENTASI PROGRAM	1. Variabel penelitian	1. Lokus penelitian	Dalam pendistribusian

BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI KELURAHAN ALALAK SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN Azizah, Akhmad Nikhrawi Hamdie, H.Muhammad Uhaib As'ad (2019)	yakni implementasi program bantuan pangan. 2. Metode Penelitian Kualitatif	Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.	program BPNT melalui e-warung sudah cukup optimal dan tepat sasaran, dan pihak kelurahan selalu berkoordinasi kepada pihak dinas sosial yang sekaligus juga pelaksana dari program tersebut sehingga sejauh ini program tersebut bisa dianggap berhasil untuk membantu warga miskin yang ada dikelurahan alalak selatan. walaupun masih ada beberapa kendala yang menjadi penghambat untuk melaksanakan program BPNT melalui e-warung yaitu Yang pertama faktor sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sikap dari pengelola program.
--	--	---	---

Perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Program Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 tentang bantuan lansia berupa bantuan pangan. Pada dasarnya program bantuan pangan lansia sangat berperan penting terhadap masyarakat karena kebutuhan pangan menjadi yang utama bagi kehidupan. Dengan adanya program bantuan pangan bagi lansia, diharapkan agar masyarakat lansia dapat hidup sejahtera karena di usia lanjut, sudah mulai kelelahan fisik untuk bekerja dan mencari kebutuhan pokok sehari-hari. Maka dari itu, pemerintah membuat program untuk mensejahterakan masyarakat lanjut usia.

G. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian

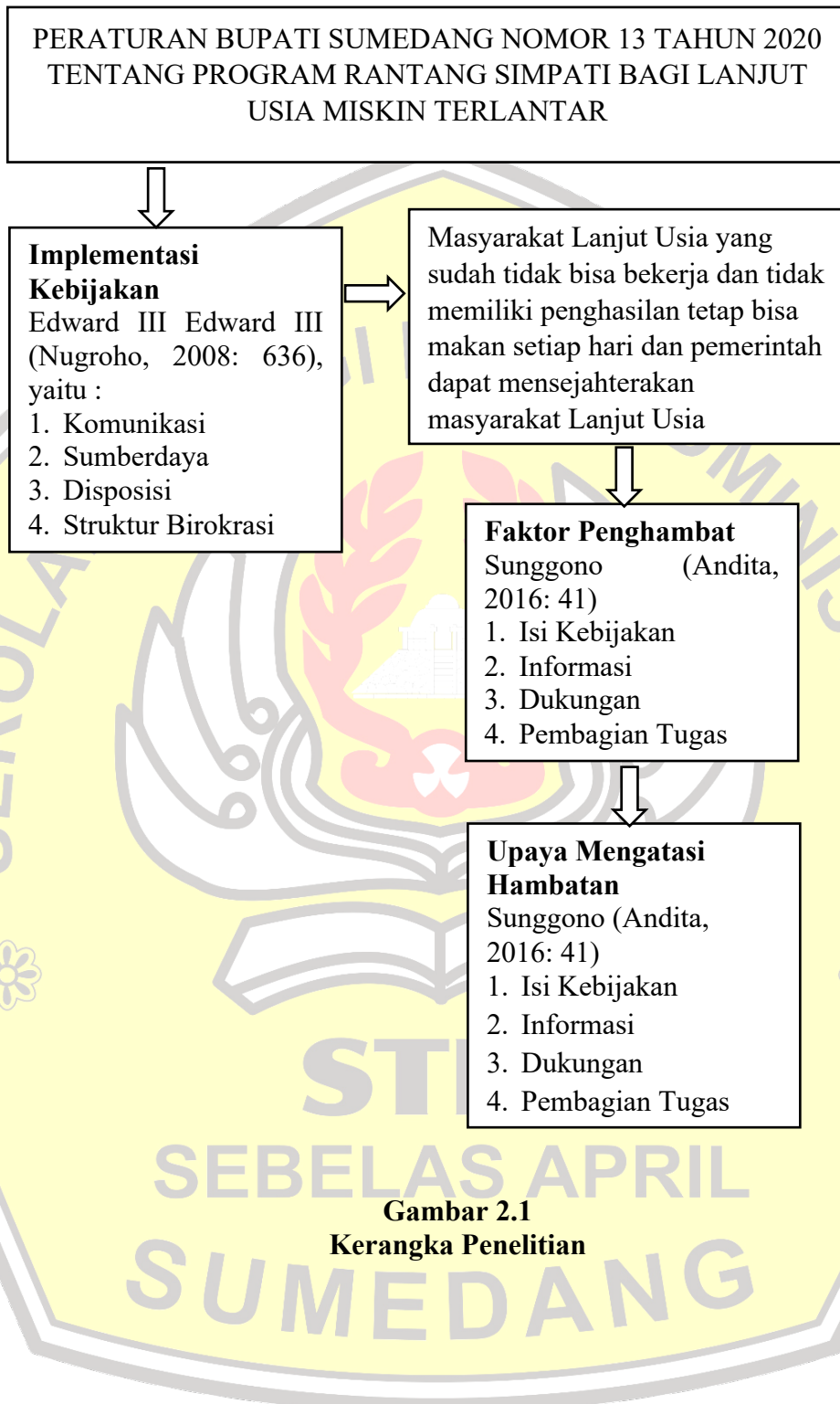
1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengukur tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sumedang nomor 13 Tahun 2020 tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar tersebut dapat diimplementasikan di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini baik dan buruknya pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran serta para implementor terkait dengan program rantang simpati yang ada, untuk itu diperlukan petugas yang terampil dan didukung dengan sarana yang memadai sehingga dapat menunjang dalam pencapaian kebijakan.

Implementasi Kebijakan Program Rantang Simpati ini dapat dikatakan berhasil, apabila implementasi Kebijakannya berjalan mengacu pada faktor implementasi kebijakan publik, menurut Edward III (Nugroho, 2008: 636) yaitu sebagai berikut:

- 
1. Komunikasi
 2. Sumber Daya
 3. Disposisi
 4. Struktur Kebijakan
- 

Untuk mempermudah memahami kerangka penelitian ini, maka secara sederhana penulis menggambarkan kedalam bagan sebagai berikut:



2. Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian

Tabel 2.2

Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian

NO	Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Item
1	Implementasi Kebijakan peraturan Bupati Sumedang nomor 13 tahun 2020 tentang Program rantang simpati bagi lanjut usia miskin terlantar Edward III (Winarno, 2012 : 177)	1. Komunikasi	a. kejelasan informasi	1
			b. media	2
			c. sosialisasi	3
		2. Sumber daya	a. sumber daya finansial	4
			b. kualitas pegawai	5
		3. Disposisi	a. memiliki kesamaan komitmen	6
			b. adanya tanggung jawab	7
			c. ketepatan waktu	8
2	Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Kebijakan peraturan Bupati Sumedang nomor 13 tahun 2020 tentang Program rantang simpati bagi lanjut usia miskin terlantar Sunggono, (Andita, 2016: 41)	1. Isi Kebijakan	a. Ketidak jelasan tujuan kebijakan	11
			b. Masih kurangnya ketepatan waktu	12
			c. Masih kurangnya sumber daya finansial	13
		2. Informasi	a. Masih kurang akuratnya penyampaian informasi	14
			b. Masih kurangnya sosialisasi kepada sasaran	15
		3. Dukungan	a. Masih kurangnya dukungan dari pemerintah	16
			b. Masih kurangnya dukungan dari masyarakat	17
		4. Pembagian potensi	a. Ketidak jelasan beban kerja yang diberikan	18
			b. Ketidak sesuaian penempatan	19

			pekerjaan.	
3	Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan peraturan Bupati Sumedang nomor 13 tahun 2020 tentang Program rantang simpati bagi lanjut usia miskin terlantar Sunggono (Andita, 2016: 41)	1. Isi kebijakan	a. Kejelasan tujuan kebijakan	20
			b. Mengefektifkan waktu semaksimal mungkin	21
			c. Mengefektifkan sumber daya finansial yang ada	22
		2. Informasi	a. Lebih akurat dalam penyampaian informasi	23
			b. Meningkatkan sosialisasi kepada sasaran	24
		3. Dukungan	a. Meningkatkan dukungan dari pemerintah	25
			b. Meningkatkan dukungan dari masyarakat	26
		4. Pembagian potensi	a. Kejelasan dalam pembagian kerja	27
			b. Menyesuaikan penempatan pekerjaan	28



STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) yaitu suatu kondisi sebagaimana adanya yang benar-benar terjadi dilapangan, peneliti tidak merekayasa dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi keilmiahan obyek yang diteliti.

Pengertian metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018 :1) sebagai berikut :

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

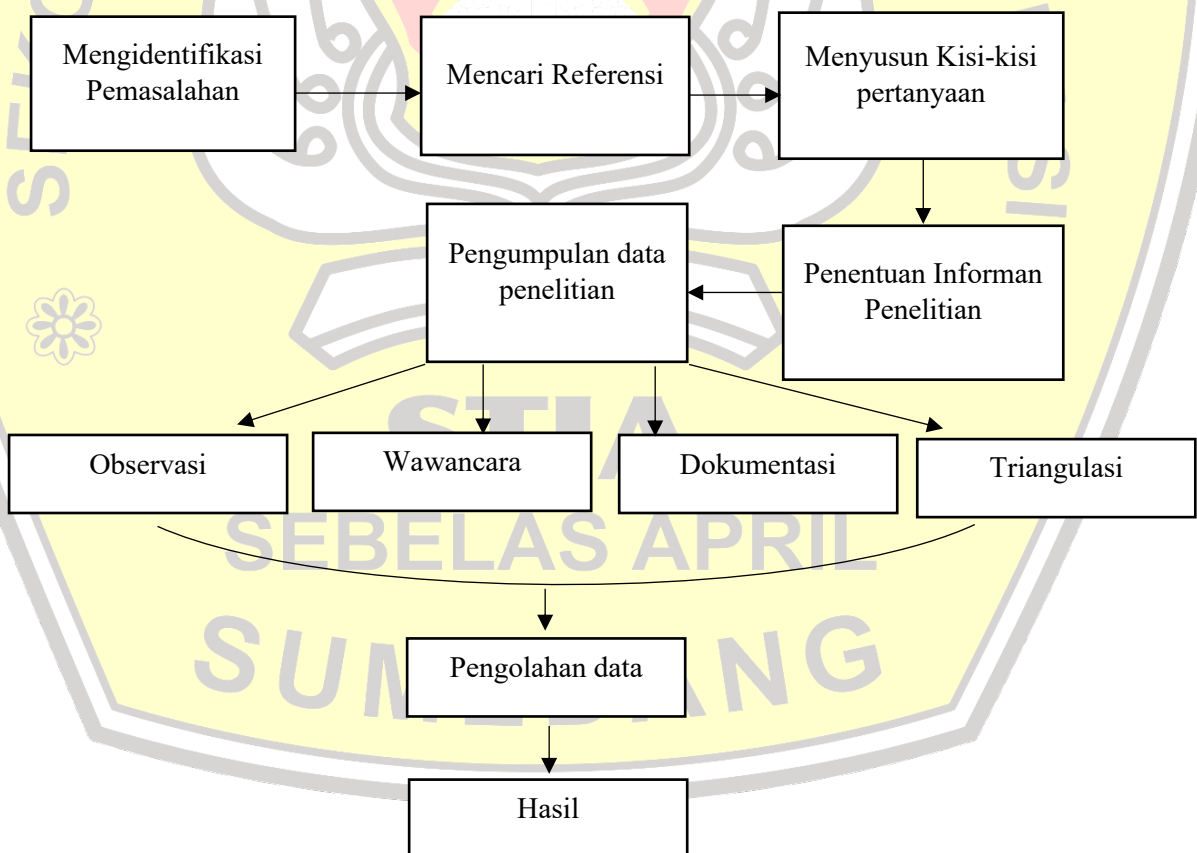
Pendapat lain dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005: 4) yang memberikan definisi sebagai berikut: “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Objek Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar yang menganalisis perilaku, persepsi, motivasi, tindakan para pegawai di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada kondisi yang sebenarnya.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Untuk kelancaran penelitian, maka peneliti menyusun desain penelitian sebagaimana di bawah ini:



Gambar 3.1
Desain Penelitian

B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

1. Penentuan Sasaran Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, selalu berhadapan dengan subjek yang diteliti, baik berupa manusia, benda, maupun aktivitas-aktivitas atau suatu masalah keseluruhan karakteristik objek penelitian. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun oleh Spradey (dalam Sugiyono, 2018: 48) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Maksud dari tempat (*place*) dalam penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, pelaku (*actors*) merupakan pegawai Kantor Kecamatan, dan aktivitas (*activity*) merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai yang berinteraksi secara sinergis khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar Di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Dari uraian tersebut maka ditetapkanlah sasaran penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang berjumlah sebanyak 26 orang pegawai.

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang benar benar memahami permasalahan dengan argument bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Bungin (2008: 76) bahwa: “Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi

objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut sugiyono (2005: 54) *purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan dalam penelitian dan mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah mereka-mereka yang ada hubungannya dengan pelaksanaan program rantang simpati.

Informan penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Otoritas yang dimiliki oleh informan terutama yang berkaitan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar.
2. Dianggap memiliki informasi yang banyak terutama mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar.
3. Memiliki keterkaitan, baik individu maupun kelompok organisasi tersebut, terutama keterkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar.

Adapun yang ditentukan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang benar-benar memahami dan memiliki informasi mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar, Maka yang dijadikan informan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Sasaran	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Bendahara	1
3.	Kasi Sosial	1
4	Staf Kasi Sosial	1
5	Staf Kasi Sosial dan Tim Monitoring Program	1
Jumlah		5

Sumber: Penelitian 2021

Selain itu, untuk lebih memperluas data pegawai, peneliti mencantumkan beberapa pengelompokan data diri pegawai yang dijadikan informan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar seperti dibawah ini:

Tabel 3.2
Data Informan

No	Jabatan	Pengelompokan		
		Umur	Tingkat pendidikan	Jenis kelamin
1.	Camat	53 Tahun	S1	Laki-laki
2.	Bendahara	51 Tahun	D1	Laki-laki
3.	Kasi Sosial	52 Tahun	S1	Laki-Laki
4.	Staf Kasi Sosial	53 Tahun	SMA	Perempuan
5.	Staf dan Monitoring	21 Tahun	SMA	Laki-laki

Sumber: Renstra Kecamatan Cimanggung

Berdasarkan data-data diatas, penyusun mengambil sejumlah 5 orang informan atas pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pekerjaan tiap pegawai baik secara keseluruhan maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik Pengumpulan data menggunakan teori menurut Sugiyono (2016: 224-241), yaitu :

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi.

2. Studi lapangan, dengan cara sebagai berikut:

- a) Observasi langsung, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di Kantor Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan data-data yang diperlukan bagi penelitian.
- b) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan kepada Camat Kecamatan Cimanggung, Bendahara, Kasi Sosial, Staf Kasi Sosial, dan Tim Monitoring Program.
- c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subek penelitian. Dokumen yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan tertulis berupa peraturan dan perundang-undangan terkait dengan implementasi program rantang simpati.
- d) Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan menggunakan tiga point yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi

D. Prosedur Pengolahan Data

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data model Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2005: 91), yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum data hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan Cimanggung dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti, yaitu Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar Di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang

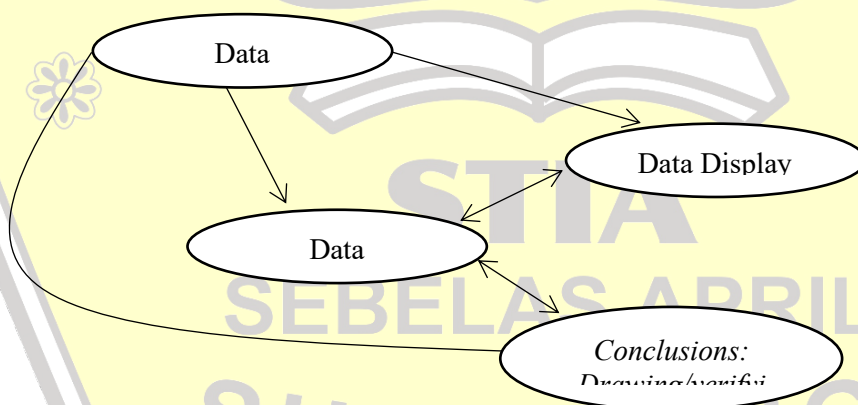
2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, sehingga data yang dilakukan cenderung bersifat naratif. Selanjutnya Sugiyono (2005: 95) menyarankan selain dengan teks naratif, juga berupa grafik, matrix, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3. *Conclucion Drawing/verification*

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan gambaran tentang hal yang di teliti dan didukung oleh data-data yang akurat. Kesimpulan ini pada akhirnya dapat dijadikan hipotesis penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka analisis data tersebut diatas oleh Sugiyono (2005: 92) digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2
Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan peraturan Bupati nomor 13 tahun 2020 tentang program Rantang Simpati bagi lanjut usia miskin terlantar di kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program rantang simpati ini sebenarnya sudah berjalan cukup baik, program yang dibuat oleh Bupati Sumedang ini mengutamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lansia (lanjut usia) yang sudah sebatang kara dan tidak mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dapat dikatakan sudah baik karena dari hasil wawancara dan observasi di kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang bahwa program rantang simpati ini dari mulai dibuatkannya surat keputusan sampai tersampainya bantuan tersebut kepada sasaran sudah sesuai standar operasional prosedur, kemudian dari penyampaian informasinya meski terkendala akses jarak tempuh, namun masih bisa diupayakan melalui media online grup whatsapp dan bekerja sama dengan desa dan masyarakat sekitar, namun masih terdapat juga beberapa kendala atau permasalahan yang ditemui dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati nomor 13 tahun 2020 tentang program Rantang Simpati bagi lanjut usia miskin terlantar di kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang seperti masalah anggaran dan ketepatan waktu dalam menjalankan program ini.

2. Faktor-faktor penghambat dalam menjalankan implementasi kebijakan peraturan Bupati nomor 13 tahun 2020 tentang program Rantang Simpati bagi lanjut usia miskin terlantar di kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang ini yaitu masih sering terjadinya keterlambatan anggaran yang turun yang diakibatkan oleh anggaran yang lebih difokuskan terlebih dahulu untuk masalah covid-19 yang menyebabkan keterlambatan waktu juga. Kemudian dari keputusan yang ditetapkan yang hanya memberikan dana sebesar Rp. 20.000 untuk satu hari makan yang dirasa masih kurang untuk bantuan makanan. Kouta penerima bantuannya pun terbatas, hanya diberi kouta 20 orang untuk satu kecamatan.
3. Upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan peraturan Bupati nomor 13 tahun 2020 tentang program Rantang Simpati bagi lanjut usia miskin terlantar di kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik, tidak terlambatnya anggaran yang turun dan selalu melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan-kekurangan dalam menjalankan proram rantang simpati ini.

B. Saran

Pada akhir penulisan peneliti menuliskan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yang sekiranya dianggap perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa saran:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kecamatan Cimanggung untuk selalu menjalankan program rantang simpati ini dengan semangat dan ikhlas, serta

selalu melakukan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang membantu dalam menjalankan program rantang simpati ini.

2. Kepada pemerintah Kabupaten Sumedang, diharapkan anggaran yang dikhususkan untuk program rantang simpati ini jangan sampai mengalami keterlambatan, karena ini merupakan bantuan makanan serta yang diberikan bantuannya pun masyarakat yang sudah berumur lanjut (lanju usia). Kemudian lebih meluas lagi dalam memberikan kouta penerima bantuan. Sebaiknya tidak di batas karena tidak ditakutkan ada beberapa lansia yang tidak dapat bantuan padahal berhak mendapatkan bantuan.
3. Kepada masyarakat sekitar yang ikut membantu, diharapkan ikut selalu membantu program-program yang dibuat oleh pemerintah serta selalu mendukung karena tidak ada program yang dibuat pemerintah yang merugikan masyarakat, serta selalu jalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah baik Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten.



STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Agus, Erwan P. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggara, Sahya 2018. *Ilmu Administrasi Negara kajian konsep dan fakta dalam upaya menciptakan good government*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Dunn, William. 2016. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Handayani, Soewarno 1980. *Pengantar ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Hasibuan, Malayu 2001. *Manajemen dasar, pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indradi, Samsiar 2016. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Iskandar. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Nugraha, D. S., Setiawan, A. ., Agningsih, D. P. ., Aprilianti, D. N. ., Sutisna, E. ., & Yuliani, L. . (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 49-59. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/52>
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, 2014. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Silalahi, Ulbert. 1989 *Studi Tentang ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung

Soehardjo, 2000. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen Visualisasi dalam bagan*. Jatinangor: Departemen Dalam Negeri Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Sunggono, 2016. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

STIA Sebelas April Sumedang, 2021. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumedang : STIA Sebelas April Sumedang

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi 2012. *Kebijakan publik : Teori Proses dan Studi kasus*. Yogyakarta: CAPS

DOKUMEN-DOKUMEN:

1. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 yaitu upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Renstra Kecamatan Cimanggung Tahun 2018

SUMBER LAINNYA:

Silviany, Mona (2015) *Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.*

<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/5069>

Saputro, Alfi Arif (2020) *Implementasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018.* Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal

<http://repository.upstegal.ac.id/1317/>

Wardani, Anita Kusuma (2020) *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.*

<http://repository.unim.ac.id/2665/>

Mariama, Qamariah, Afifudin, Suyeno (2020) *Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Palu).*

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/8107>

